

**ANALISIS INTERAKSI SPASIAL PUSAT PELAYANAN
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)



OLEH

RAHMI FITRI

1106532/2011

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

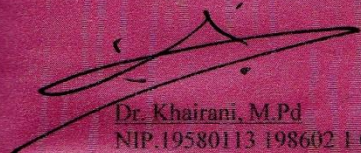
SKRIPSI

Judul : Analisis Interaksi Spasial Pusat Pelayanan Di Kabupaten
Tanah Datar
Nama : Rahmi Fitri
Nim/BP : 1106532/2011
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2016

Disetujui oleh :


Pembimbing I


Dr. Khairani, M.Pd
NIP.19580113 198602 1 001

Pembimbing II


Ahyuni, S.T., M.Si
NIP.19690323 200604 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Geografi


Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Rahmi Fitri
NIM/BP : 1106532/2011

Dinyatakan lulus setelah mempertahankan skripsi di depan Tim Penguji
Program Studi Pendidikan Geografi
Jurusan Geografi
Universitas Negeri Padang
dengan judul

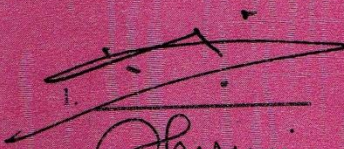




ANALISIS INTERAKSI SPASIAL PUSAT PELAYANAN DI KABUPATEN TANAH DATAR

Padang, Februari 2016

Tim Penguji

Ketua : Dr. Khairani, M.Pd
Sekretaris : Ahyuni, S.T, M.Si
Anggota : Drs. Moh Nasir B
Anggota : Febriandi, S.Pd, M.Si
Anggota : Ratna Wilis, S.Pd, MP

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 



UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI

Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang 25131, Telp. (0751) 7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMI FITRI
Nim/BP : 1106532/2011
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

"Analisis Interaksi Spasial Pusat Pelayanan di Kabupaten Tanah Datar".
Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 9 Februari 2016

Diketahui oleh,
Ketua Jurusan Geografi

Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP.19620603 198603 2 001

Saya yang menyatakan,

Rahmi Fitri
NIM/TM.1106532/2011

ABSTRAK

Rahmi Fitri (2011) : Analisis Interaksi Spasial Pusat Pelayanan di Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pusat pelayanan berdasarkan kekuatan interaksi spasial di Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kawasan Kabupaten Tanah Datar. Sampel penelitian ditetapkan dengan teknik *total sampling*, yang berjumlah 14 wilayah kecamatan yaitu: Batusangkar, Balai tengah, Saruaso, Simabur, Tabek patah, Sungai Tarab, Koto Baru, Sumpur, Kubu Kerambil, Rambatan, Sungayang, Tigo Jangko, Padang Gantiang, dan Tanjuang Alam. Analisis data yang digunakan adalah analisis data statistik deskriptif.

Hasil penelitian berdasarkan perhitungan kekuatan interaksi spasial di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa tingkat pusat pelayanan yang diperoleh yaitu lokasi PKL berada pada wilayah Lima Kaum & Kota Batusangkar sesuai dengan hasil perhitungan, lokasi PKLp dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar berada pada wilayah Balai Tengah, dalam perhitungannya PKLp lebih sesuai berada di Sungai Tarab. Lokasi PPK berada pada wilayah Pasa Rabaa, Saruaso, Sungayang, Simabur, dan Balai Tengah. Namun dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar 2011-2031, Pasa Rabaa diposisikan pada PPL. Dan untuk lokasi PPL berada pada wilayah Tabek Patah, Tanjuang Alam, Rambatan, Kubu Kerambil, Sumpur, Buo, dan Padang Gantiang. Dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar 2011-2031 wilayah PPL sudah sesuai kecuali satu wilayah yaitu Tabek Patah yang berfungsi sebagai PPK.

Kata Kunci: *Analisis Interaksi Spasial, Pusat Pelayanan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Interaksi Spasial Pusat Pelayanan di Kabupaten Tanah Datar”

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan baik moril maupun materil, yang selalu memberikan semangat dan untaian do'a untuk kelancaran skripsi penulis. Penulis menyadari tidak akan mampu membalas jasa-jasa tersebut, semoga Allah azza wa jalla memberikan balasan yang dapat mengantarkan kesyurgaNya. Terkhusus kepada :

1. Bapak Dr. Khairani, M.Pd selaku dosen pembimbing I dan sekaligus pembimbing akademik penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan motivasinya selama ini.
2. Ibu Ahyuni, ST M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Moh Nasir B, Bapak Febriandi, M.Si, dan Ibu Ratna Wilis, S.Pd., MP sebagai dosen penguji yang telah bersedia memberikan saran, kritikan dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Dra. Yurni Suasti, M.Si selaku Ketua Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Nofrion, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Segenap Staf Pengajar dan karyawan di lingkungan Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama duduk di bangku kuliah.
7. Segenap Jajaran Staf dan Karyawan Akademik serta Perpustakaan Fakultas yang telah banyak membantu dalam pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.
8. Orang tuaku, Ayahanda Abdurrahim dan Ibunda Elvi Deswita yang telah mendidik, mencurahkan semua kasih sayang tiada tara, mendo'akan keberhasilan penulis, serta memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk abangku Fakhry Rahim, kembaranku Rahma Fitra terima kasih atas semangat yang selalu engkau tularkan padaku, dan adikku tersayang Zilva Hayati adik kebangganku, serta seluruh keluargaku yang selalu memberikan semangat tanpa pamrih.

10. Para sahabat dan teman-teman Jurusan Geografi, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga segala bimbingan dan dorongan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, Januari 2016

Rahmi Fitri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Interaksi Spasial	12
a. Pengertian Interaksi Spasial	12
b. Tiga Unsur Interaksi Spasial/Keruangan	13
c. Indikator Interaksi Spasial	15
2. Pusat Pelayanan	21
3. Hirarki Pelayanan	22

4. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	25
B. Penelitian yang Relevan	29
C. Kerangka Konseptual	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Populasi dan Sampel	33
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian	36
D. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	42
B. Hasil Penelitian	53
C. Pembahasan	65
D. Keterbatasan Penelitian	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Fungsi Kota Kabupaten	4
Tabel 2.1 Hirarki Kabupaten Sumba Timur	28
Tabel 3.1 Karakteristik Tingkat Level of Service (LOS)	39
Tabel 4.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	45
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per Ibukota Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014	46
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk pada setiap ibukota kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014	53
Tabel 4.4 Pengelompokan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010	55
Tabel 4.5 Orde Perkotaan di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Metode <i>Rank Size Rule</i>	57
Tabel 4.6 Data Transportasi Dinas Perhubungan	59
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Titik Henti Setiap Kecamatan	61
Tabel 4.8 Kecamatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Terbanyak hingga Terkecil Tahun 2014	62
Tabel 4.9 Hirarki Fasilitas di Kabupaten Tanah Datar 2014	64
Tabel 4.10 Pengelompokan Jalan di Kabupaten Tanah Datar	67
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Titik Henti Antar Kecamatan	71
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Titik Henti antar Pusat Pelayanan	72
Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Setiap Indikator Interaksi Spasial	76
Tabel 4.14 Hasil Analisis Interaksi Spasial	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah-wilayah yang saling melengkapi	13
Gambar 2 Adanya Transferabilitas	14
Gambar 3 Melemahnya interaksi wilayah akibat <i>interventing opportunity</i>	15
Gambar 4 Rumus Titik Henti	18
Gambar 5 Hirarki Pusat Kegiatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	26
Gambar 6 Kerangka Konseptual	32
Gambar 6 Peta rencana struktur ruang kabupaten tanah datar	35
Gambar 7 Peta Administrasi Kabupaten Tanah Datar	44
Gambar 8 Peta Pusat Pelayanan Kawasan Kabupaten Tanah Datar	50
Gambar 9 Peta Pelayanan Lingkungan Kabupaten Tanah Datar	52
Gambar 10 Peta Klasifikasi Desa dan Kota Kabupaten Tanah Datar	56
Gambar 11 Peta Orde Perkotaan Metode <i>Rank Size Rule</i>	58
Gambar 12 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Tanah Datar	60
Gambar 13 Peta Jaringan Titik Henti Kabupaten Tanah Datar	63
Gambar 14 Peta Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Jalan	69
Gambar 15 Peta Lokasi Titik Henti Antar Kota Kab. Tanah Datar	73
Gambar 16 Peta Hirarki Pusat Pelayanan Metode Skalogram	75
Gambar 17 Peta Hasil Penelitian Struktur Ruang Kota Kabupaten	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Jumlah Penduduk Metode Rank Size Rule	86
Lampiran 2 Perhitungan Titik Henti Antar Kecamatan	88
Lampiran 3 Analisis Penilaian Tingkat Pelayanan Melalui Metode Skalogram Guttman	93
Lampiran 4 Surat izin penelitian	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan wilayah masih menjadi masalah terbesar bagi negara-negara yang sedang berkembang. Ketidakmerataannya pembangunan di seluruh sektor menjadikan Indonesia sebagai negara yang belum mampu memetakan pembagian wilayahnya yang sesuai dengan potensi dari masing-masing wilayah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi geografis dan kondisi sosial budaya yang kaya. Namun, kekayaan alam dan budaya masih belum bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Masalah ini tentunya menjadi perhatian yang besar bagi pemerintah Indonesia. Adanya perbedaan potensi di setiap wilayah menjadi titik tolak direncanakannya pengembangan dan perencanaan pembangunan wilayah.

Pengembangan wilayah merupakan upaya dalam mengurangi ketimpangan wilayah, memacu pembangunan sosial ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menurut Direktur Jendral Penataan Ruang Ir. H. Sjarifuddin Akil, pengembangan wilayah adalah rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI. Sehingga pengembangan wilayah dapat

diartikan sebagai rangkaian upaya untuk pembangunan secara berkelanjutan yang merata bagi seluruh wilayah di Indonesia dalam menyeimbangkan pembangunan dalam berbagai sektor.

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah ini, pemerintah Indonesia melalui upaya penataan ruang mengharapakan agar sasaran dan tujuan pembangunan kewilayahan dapat tercapai. Sehingga dalam sistem rencana penataan ruang wilayah, diselenggarakan secara berhirarki. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, sistem perencanaan tata ruang wilayah diselenggarakan secara berhirarki menurut kewenangan administratif, yakni dalam bentuk RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci. RTRWN disusun dengan memperhatikan wilayah Nasional sebagai satu kesatuan wilayah yang lebih lanjut dijabarkan kedalam strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang pada wilayah provinsi (RTRWP), termasuk di dalamnya penetapan sejumlah kawasan tertentu dan kawasan andalan yang diprioritaskan penanganannya.

Menurut Robinson Tarigan (2010: 58), struktur ruang menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitan antara berbagai ruang berdasarkan pemanfaatannya serta hirarki dari pusat permukiman dan pusat pelayanan. Berdasarkan hal tersebut perencanaan ruang pada setiap hirarki berbeda pada tingkat nasional, yaitu RTRW Nasional hanya mencapai kedalaman penetapan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pada

RTRW Provinsi hanya berupa penjabaran dari RTRW Nasional. Sedangkan pada level Kabupaten atau kota, pengendalian sudah berupa ketentuan dan arahan untuk setiap kawasan.

Pada RTRW Kabupaten, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menentukan penggunaan lahan, dan penetapan beberapa kawasan yang tidak diatur secara tegas dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi. Rencana tata ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang terbentuk oleh hirarki pusat-pusat kegiatan dimana satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana utama maupun prasarana lainnya terutama jaringan transportasi. Adapun sistem pusat-pusat kegiatan dalam RTRW Kabupaten terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang terdapat di wilayah Kabupaten serta pusat kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten yaitu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) (RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011).

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

1. PKN yang berada di wilayah kabupaten;
2. PKW yang berada di wilayah kabupaten;
3. PKL yang berada di wilayah kabupaten;
4. PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan

5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:

- 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
- 2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Tabel 1.1 Kriteria Fungsi Kota Kabupaten

No	Fungsi Kota	Kriteria
1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industry dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa distrik (kecamatan): dan/ atau Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa distrik (kecamatan) Diusulkan oleh pemerintah kabupaten atau kota
2	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industry dan jasa yang melayani skala distrik (kecamatan) atau beberapa kampung (desa)): dan/ atau Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala distrik (kecamatan) atau beberapa kampung (desa)): dan/ atau Diusulkan oleh pemerintah kabupaten atau kota
3	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	<ul style="list-style-type: none"> Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industry dan jasa yang melayani skala distrik (kecamatan) atau beberapa kampung (desa)): dan/ atau Diusulkan oleh pemerintah distrik (kecamatan)

Sumber : PP 26 Tahun 2008 dan Hasil Analisis Tahun 2009

Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Tanah Datar merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi masyarakat di wilayah Kabupaten. Dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar sendiri, Kota Batusangkar sebagai ibukota Kabupaten merupakan salah satu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2029. Sedangkan untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah ditetapkan dalam rencana sistem perkotaan di Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut.

1. Pusat Kegiatan Lokal: Kota Batusangkar
2. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) : Balai Tengah
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK): Saruaso, Simabur, Tabek Patah, Sungaitarab
4. Pusat Pelayanan Lingkungan: Koto Baru, Sumpur, Kubu Kerambil, Rambatan, Sungayang, Tigo Jangko, Padang Gantiang, Tanjung Alam.

Wilayah-wilayah pusat pelayanan tersebut tentunya memiliki potensi ruang yang berbeda sehingga mendukung terjadinya pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Tanah Datar. Hal itu berpengaruh terhadap keseimbangan spasial dari seluruh wilayah pusat pelayanan tersebut yang ditunjukkan oleh orientasi pembangunan sarana dan prasarana serta segala aliran aktivitas masyarakat.

Konsentrasi aktivitas masyarakat tentu dipengaruhi oleh sarana prasarana tersebut, dimana wilayah Kabupaten Tanah Datar dalam pemerataan pembangunan masih mengalami perkembangan. Hal ini memberikan dampak terhadap fungsi dari pusat pelayanan, apalagi rencana pembangunan dalam beberapa dekade pergantian pemerintah terus berubah-ubah serta pengaruh dari aktivitas spasial akan berdampak besar terhadap pusat pelayanan. Pembangunan tersebut baik di bidang transportasi, pendidikan, pasar, pelayanan kesehatan, serta pelayanan lainnya. Selain itu, adanya pusat pertumbuhan baru yang muncul sebagai akibat interaksi keruangan juga memberi kontribusi besar terhadap perubahan fungsi pusat pelayanan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisa interaksi spasial yang terdapat di wilayah Kabupaten Tanah Datar untuk melihat bagaimana pengaruh besarnya terhadap berbagai pusat pelayanan yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031. Dengan demikian, analisa ini penulis tuangkan dalam proposal penelitian yang berjudul **"Analisis Interaksi Spasial Pusat Pelayanan di Kabupaten Tanah Datar"**.

B. Identifikasi Masalah

Bertitiktolak dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana karakteristik daerah pusat pelayanan di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana kekuatan interaksi antardaerah pusat pelayanan di Kabupaten Tanah Datar?

3. Bagaimana pusat-pusat pertumbuhan yang terdapat pada pusat pelayanan di Kabupaten Tanah Datar?
4. Bagaimana konsentrasi pergerakan penduduk terhadap pusat pelayanan di Kabupaten Tanah Datar?
5. Bagaimana pengaruh pusat pelayanan di Kabupaten Tanah Datar terhadap pusat kota?
6. Bagaimana pengaruh interaksi spasial terhadap fungsi daerah pusat pelayanan di Kabupaten Tanah Datar?
7. Bagaimana kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan pusat pelayanan yang telah ditetapkan?

C. Batasan Masalah

Sistem pusat pelayanan wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten tersebut. Dalam rencana sistem pusat kegiatan terdiri dari :

1. PKN (Pusat Kegiatan Nasional) yang berada di wilayah kabupaten;
2. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang berada di wilayah kabupaten;
3. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang berada di wilayah kabupaten;
4. PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) yang berada di wilayah kabupaten; dan
5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:

- 1) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp)
- 2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- 3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

PKN dan PKW dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kembali dijelaskan dalam RTRWP, sedangkan PKL tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Kota Batusangkar sebagai ibukota Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu PKL yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2029 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PKW maupun PKN yang ada disekitarnya sebagai suatu kontelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki.

Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Tanah Datar merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten. Dalam hal ini Kota Bukittinggi dan Kota Sawahlunto sebagai PKW sesuai RTRW Provinsi Sumatera Barat ikut berperan dalam memberi pelayanan bagi PKL-PKL lain yang ada disekitarnya termasuk Kota Batusangkar.

Maka berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah, penulis merasa perlu membatasi permasalahan terhadap

analisa pusat pelayanan yang dikaji di Kabupaten Tanah Datar ini, yaitu dibatasi pada pusat pelayanan :

- 1) PKL (Pusat Kegiatan Lokal), dalam hal ini terdapat di Kota Batusangkar.
- 2) PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi), yaitu di Nagari Balai Tangah
- 3) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan), yaitu terdiri dari 3 (tiga) yaitu Nagari Simabur, Nagari Saruaso, Nagari Tabek Patah dan Nagari Sungai Tarab, dan
- 4) PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) terdiri dari 9 (sembilan) yaitu Nagari Koto Baru, Nagari Sumpur, Nagari Batipuh Baruah, Nagari Rambatan, Nagari Sungai Tarab, Nagari Sungayang, Nagari Padang Ganting, Nagari Buo, dan Nagari Tanjung Alam.

Empat pusat pelayanan di atas juga sesuai dengan pusat-pusat kegiatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar dan tertuang pada pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012. Sehingga dengan demikian dapat dianalisis bagaimana kesesuaiannya terhadap wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011- 2031.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kekuatan interaksi spasial pusat pelayanan di Kabupaten Tanah Datar?

2. Bagaimana kesesuaian tingkat pusat pelayanan berdasarkan analisis interaksi spasial terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diperoleh tujuan penelitian inisebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kekuatan interaksi spasial pusat pelayanan di Kabupaten Tanah Datar.
2. Membandingkan hasil analisis pusat pelayanan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031 berdasarkan kekuatan interaksi spasial.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut.

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk pengembangan pengetahuan dalam segi teoritis (keilmuan) terhadap perkembangan ilmu Geografi, khususnya pada geografi desa-kota, melalui analisis interaksi spasial yang penulis teliti.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Geografi, Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Publik

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi analisis interaksi spasial serta dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya serta menjadi pengembangan dan penerapan kajian bidang ilmu yang penulis pelajari.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mempertimbangkan perencanaan tata ruang wilayah.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Interaksi Spasial

a. Pengertian Interaksi Spasial

Interaksi menurut KBBI berarti berhubungan dan saling mempengaruhi. Sedangkan interaksi spasial adalah hubungan saling mempengaruhi dalam spasial atau keruangan, dimana interaksi spasial didalam geografi menyangkut desa dan kota. Menurut Enok Maryani dan Bagja Waluya, (2008: 29), interaksi wilayah atau spasial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan atau permasalahan baru.

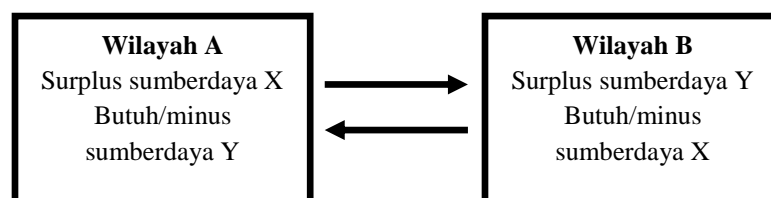
Interaksi spasial menurut Ullman mencakup gerak dari barang, penumpang, migran, uang informasi, sehingga konsepnya sama dengan *Geography of Circulation* (N. Daldjoeni, 2003:245). Dan beberapa pendapat lain menyebutkan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan saling mempengaruhi antara gejala-gejala pada tempat-tempat dan area-area yang berbeda-beda di dunia. Interaksi keruangan menyajikan dasar untuk menerangkan gejala lokasi, relokasi, distribusi dan difusi (N. Daldjoeni, 2003;249).

Dari berbagai pengertian tentang interaksi spasial di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa interaksi spasial merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dalam gejala, kenampakan atau permasalahan pada suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

b. Tiga Unsur Interaksi Spasial/Keruangan

Menurut Edward Ullman dalam N. Daldjoeni (2003; 247–248) ada tiga unsur atau faktor yang mendasari terjadinya interaksi spasial, yaitu:

- 1) Adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi (*regional complementarity*), adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi ini dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan wilayah dalam memenuhi kebutuhan, ketersediaan dan kemampuan sumberdaya. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

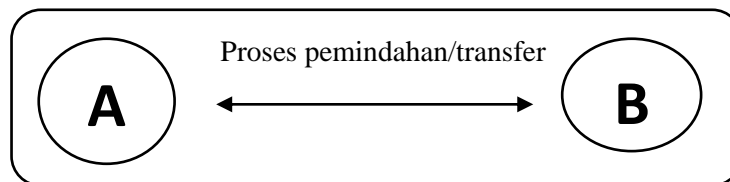


Gambar 1. Wilayah-wilayah yang saling melengkapi

Dalam hal ini, semakin besar komplementaritas, maka semakin besar pula arus komoditas yang terjadi.

2) Adanya transferabilitas, yaitu adanya kemudahan transfer atau pemindahan barang dalam ruang. Adanya kemudahan transfer ini sangat bergantung pada:

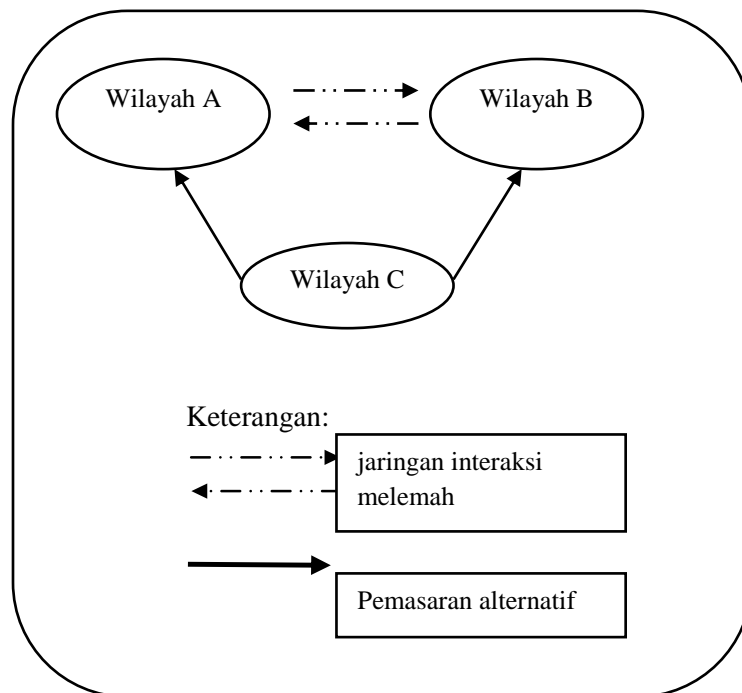
- a) Jarak mutlak dan relatif antara tiap-tiap wilayah
- b) Biaya angkut atau transport untuk memindahkan manusia, barang, dan informasi dari satu tempat ke tempat lain.
- c) Kemudahan dan kelancaran prasarana transportasi antar wilayah, seperti kondisi jalan, relief wilayah, jumlah kendaraan sebagai sarana transportasi dan sebagainya.
- d) Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Adanya transferabilitas

3) Adanya kesempatan saling berintervensi (*interventing opportunity*), yaitu suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah atau dapat menimbulkan suatu persaingan antar wilayah. Misalnya terjadi bencana alam seperti banjir sehingga gerak migrasi, transportasi, komunikasi terganggu atau tak mungkin terlaksana, maka manusia memutuskan untuk memilih tujuan lain, karena rencana semula gagal. Pilihan lain untuk melaksanakan rencana semula buntu.

Halini disebut *the obsence of intervening opportunities* (absennya kemungkinan yang menyela). Jadi, semakin besar *intervening opportunities*, maka semakin kecil arus komoditas yang terjadi. Ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Melemahnya interaksi wilayah akibat *intervening opportunity*

c. Indikator Interaksi Spasial

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan banyaknya komposisi penduduk atau masyarakat dalam suatu kawasan. Jumlah penduduk akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan penduduk itu sendiri dari suatu tempat ke tempat lain dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya. Di samping itu juga dalam bidang

transportasi, jumlah penduduk sangat berperan dalam jaringan transportasi itu sendiri. Sebagaimana menurut Zulfiar Sani, bertambahnya jumlah penduduk dalam suatu kota secara umum dapat meningkatkan penggunaan angkutan umum dan kendaraan pribadi dalam pada wahana transportasi. Tentunya akan mempengaruhi jaringan jalan dan pergerakan penduduk yang terdapat pada sistem transportasi.

2. Transportasi

Menurut Zulfiar Sani, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian suatu bangsa. Di mana transportasi (Trans=perpindahan dan Port = tempat asal dan tujuan); adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia, hewan atau mesin.

Menurut Syafri Anwar, jaringan transportasi merupakan sarana dan prasarana yang memindahkan barang atau orang ke tempat tujuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berguna bagi kepentingan hidup masyarakat. Dalam jurnal Kajian Lemhannas RI, edisi 14 Desember 2012, menyatakan bahwa sistem transportasi yang andal merupakan sarana penunjang kemajuan ekonomi karena akan mendukung migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang mampu mendistribusikan barang

dari satu tempat ke tempat lainnya secara meluas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transportasi merupakan wahana atau sarana prasarana yang digunakan dalam perpindahan barang ataupun orang dari tempat asal ke tempat tujuan yang dapat menunjang kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

3. Teori Titik Henti (*The Breaking Point Theory*)

William J. Reilly mengadopsi teori gravitasi untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Beliau mengatakan bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk masing-masing wilayah dan jarak mutlak diantara wilayah-wilayah tersebut. Inti dari teori ini adalah bahwa jarak titik henti atau titik pisah dari pusat perdagangan yang lebih kecil ukurannya adalah berbanding lurus dengan jarak antara ke dua pusat perdagangan itu, dan berbanding terbalik dengan satu ditambah akar kuadrat jumlah penduduk kota atau wilayah yang penduduknya lebih besar, dibagi dengan jumlah penduduk kota atau wilayah yang lebih sedikit penduduknya.

Rumus *Breaking Point Theory* :

$$D_{AB} = \frac{d_{AB}}{1 + \sqrt{\frac{P_A}{P_B}}}$$

Gambar 4. Rumus Titik Henti

Keterangan:

D_{AB} = jarak titik henti (dari wilayah penduduk terkecil)

d_{AB} = jarak wilayah A dan B

P_A = jumlah penduduk kota terbesar

P_B = jumlah penduduk kota terkecil

4. Sarana Wilayah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, dengan kata lain juga dapat disebut alat atau media. Sarana selalu diikuti dengan prasarana, dimana prasarana (Jayadinata, 1992) merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah.

Menurut Budiharjo (1993), beberapa sarana prasarana yang penting bagi kelayakan hidup manusia, yaitu :

- a. Pelayanan sosial (*social services*), seperti sekolah, klinik, puskesmas, rumah sakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah.

- b. Fasilitas sosial (*social facilities*), seperti tempat peribadatan, gedung pertemuan, lapangan olahraga, ruang terbuka, pasar, pertokoan, warung, dan sebagainya.
- c. Prasarana lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, drainase dan lain-lain.

Dalam pembangunan suatu daerah sarana dan prasarana merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan agar meningkatnya kualitas kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan sarana dan prasarana secara optimal sesuai fungsinya. Suatu wilayah tentunya memiliki sistem prasarana wilayahnya sendiri, dimana sistem prasarana wilayah (Robinon Tarigan, 2010: 66) adalah jaringan yang menghubungkan satu pusat kegiatan dengan pusat kegiatan lainnya, yaitu antara satu pemukiman dengan pemukiman lainnya, antara lokasi budi daya dengan lokasi pemukiman dan antara lokasi budi daya dengan lokasi budi daya lainnya.

Menurut Lutfi Muta'ali (2013: 197), sistem prasarana wilayah terbagi kedalam dua tipe yaitu:

- a. *Pertama*, prasarana pembentuk sistem integrasi wilayah yang meliputi transportasi, energi-listrik,telekomunikasi, pengairan dan pemasaran.

- b. *Kedua*, prasarana dan sarana pelayanan publik meliputi : pendidikan, kesehatan, administrasi publik, olahraga, sarana sosial, prasarana lingkungan lainnya.

Selain dari sarana dan prasarana wilayah diatas, menurut Lutfi Muta'ali (2013) dalam RTRW khususnya skala lebih mikro juga dibahas fasilitas pelayanan yang langsung dimanfaatkan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan prasarana lingkungan lainnya. Pelayanan sosial dasar dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu, pelayanan sosial menjadi salah satu indikator dalam meneliti pusat-pusat pelayanan di suatu wilayah dalam keterkaitan antara pelayanan sosial ekonomi dengan pengembangan wilayah. Untuk kota kabupaten indikator pelayanannya berupa pusat rumah tangga dan pusat pembangunan. Beberapa jenis pelayanan sosial ekonomi yang dianalisis dalam RTRW adalah sebagai berikut.

- a. Fasilitas Pendidikan berupa : SD, SLTP dan SMA
- b. Fasilitas Pendidikan berupa : Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
- c. Fasilitas Ekonomi berupa : Pasar dan Koperasi

2. Pusat Pelayanan

Pusat pelayanan merupakan titik-titik pertumbuhan yang terjadi di beberapa tempat tertentu saja karena adanya kekuatan penggerak pembangunan, dimana kekuatan tersebut dapat merangsang kegiatan-kegiatan lainnya untuk tumbuh dan berkembang. Kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai kecenderungan untuk mengelompok membentuk suatu kesatuan yang pada akhirnya menjadi pusat dari kegiatan atau disebut sebagai pusat pelayanan, jadi pusat-pusat pelayanan merupakan suatu aglomerasi dari berbagai kegiatan atau aktivitas serta aglomerasi dari berbagai prasarana dan sarana yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan di pusat-pusat pelayanan terdapat tiga unsur menurut Daldjoeni, 1992: 101 dan Glasson, 1977: 134), yaitu:

- a) Hirarki: Tingkatan pelayanan dimulai dari pelayanan tingkat rendah yang terdapat di pusat-pusat kecil (kota kecil) sampai pada pelayanan tingkat tinggi yang terdapat di pusat-pusat besar (kota besar).
- b) Penduduk ambang: Jumlah penduduk minimum yang dapat mendukung kegiatan pelayanan, sehingga jenis fasilitas tertentu membutuhkan penduduk ambang (*threshold population*) yang berbeda dengan fasilitas lainnya.

- c) Lingkup pasar: jarak maksimum yang bisa ditempuh oleh penduduk menuju suatu pusat pelayanan, jika di luar jarak pelayanan tersebut maka penduduk akan mencari pusat lain. Lingkup pasar juga dapat dikatakan batas pengaruh suatu pusat pelayanan terhadap wilayah sekitarnya.

3. Hirarki Pelayanan

Menurut Rondinelli dan Ruddle hirarki pelayanan di negara sedang berkembang dapat dibagi menjadi empat tingkatan pelayanan, yaitu (Rondinelli, 1978: 64-67, 175-180):

1) Pusat Desa (*Village Service Centre*).

Pusat desa merupakan pemukiman dengan berbagai kriteria, yaitu: Pertama, menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan dasar yang dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk di sekitar wilayah perdesaan. Kedua, memiliki fasilitas yang diperlukan untuk memacu kegiatan non pertanian yaitu aktifitas industri skala kecil (industri rumah tangga) dan meningkatkan produktivitas pertanian. Ketiga, merupakan pusat yang menyediakan pelayanan dasar dan berbagai kebutuhan rumah tangga dan kegiatan pertanian bagi desa-desa terpencil dan wilayah pertanian yang terisolasi. Keempat, memiliki organisasi kemasyarakatan yang dapat meningkatkan partisipasi penduduk dalam melaksanakan pembangunan. Kelima, terletak pada

titik simpul (fisik, ekonomi dan sosial) yang menghubungkan wilayah perdesaan dengan kota kecil dan pusat wilayah.

2) Kota Kecil/Kota Pasar (*Market Town: Small City*).

Fungsi utama kota ini adalah untuk kegiatan pemasaran terutama produk pertanian perdesaan dan berperan dalam menghubungkan kehidupan perkotaan dan perdesaan. Hal ini dapat terlaksana dengan adanya berbagai fasilitas dan kelembagaan untuk koleksi dan distribusi barang dan jasa ke kota yang lebih besar.

3) Kota Menengah Pusat wilayah regional (*Regional Centre*).

Pusat Wilayah ini berperan penting dalam proses transformasi dan pengembangan ekonomi wilayah serta struktur ruang. Karena secara sosial dan ekonomi kehidupan di kota menengah sangat beragam maka terjadi interaksi antara pola hidup modern (perkotaan) dengan pola tradisional (perdesaan). Kota ini juga berperan dalam menyerap penduduk migran dari desa serta menciptakan suatu mekanisme sehingga penduduk-penduduk dari desa dapat menyesuaikan diri dengan struktur ekonomi kota. Kota ini dilihat dari karakteristik fisiknya, merupakan gabungan antara wilayah yang memiliki karakter desa dengan wilayah yang berkarakter kota.

4) Kota Utama (*Primacy City*).

Kota ini berperan sebagai pusat utama dan merupakan tingkat pelayanan paling tinggi dalam melayani seluruh kegiatan dan

memiliki kedudukan yang sangat dominan. Adapun kegiatan yang terdapat di kota utama adalah komersial, jasa, administrasi pemerintahan, pendidikan, industri dan perdagangan, dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami transformasi menuju ke kegiatan tersier.

Dalam lingkup wilayah, secara umum kota-kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pusat pelayanan wilayah belakang (*hinterland services*).
- b. Pusat komunikasi antar wilayah (*international communication*).
- c. Pusat kegiatan industri (*good processing.manufacturing*).
- d. Pusat permukiman (*residensial subcenter*).

Selain fungsi di atas, terdapat pula fungsi kota sebagai pusat administrasi pemerintahan. Fungsi ini terkait langsung dengan status administrasi tiap kota, maka perlu adanya indikator kelengkapan fasilitas perkotaan di tiap kota sesuai dengan pengelompokkan fungsi yang akan diidentifikasi. Berarti makin lengkap fungsi pelayanan kota yang dimiliki, akan menunjukkan tingkat hierarki kota yang makin tinggi. Indikator untuk menunjukkan tiap fungsi di atas adalah kelengkapan atau ketersediaan fasilitas.

4. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Menurut Robinson Tarigan (2010: 58), perencanaan tata ruang wilayah merupakan suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan.

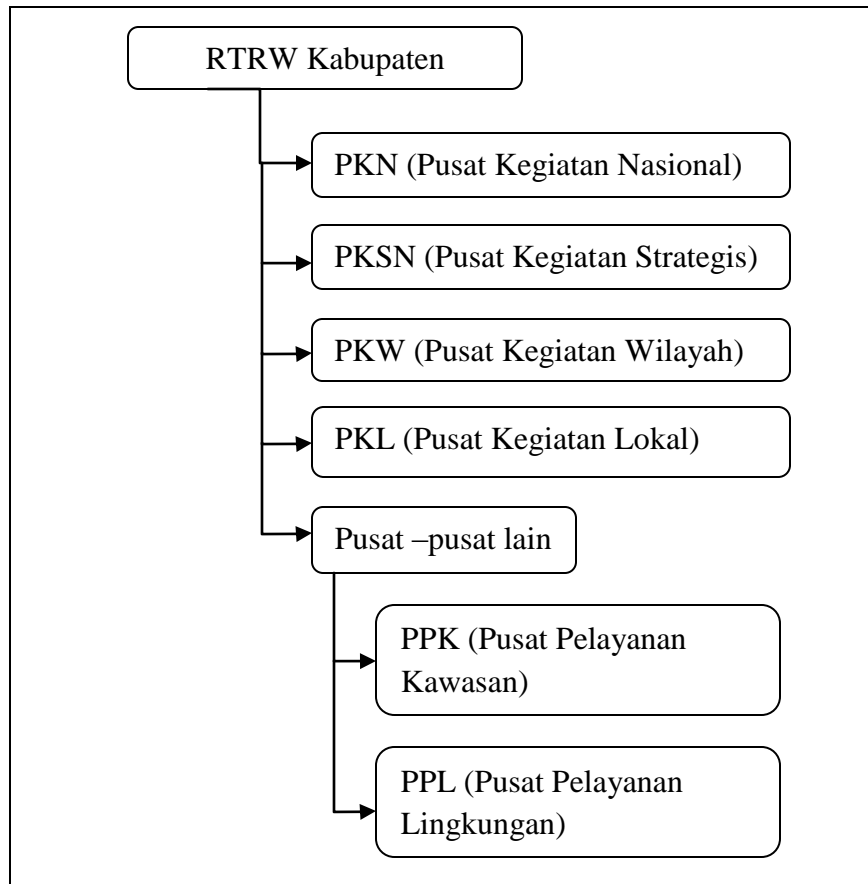
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009, rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan tersebut terdiri atas:

- a. PKN yang berada di wilayah kabupaten;
- b. PKW yang berada di wilayah kabupaten;
- c. PKL yang berada di wilayah kabupaten;
- d. PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan
- e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:

- 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan

- 2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa

Gambar 5. Hirarki Pusat Kegiatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.



Sumber: Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009

Adapun penjelasan tentang pusat-pusat kegiatan tersebut menurut

Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009, yaitu:

a) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

b) PKSN (Pusat Kegiatan Strategis)

adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara

c) PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

d) PKL (Pusat Kegiatan Lokal)

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL diarahkan sebagai pusat pelayanan utama yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, simpul transportasi utama.

e) PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi)

adalah Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari. Fungsi utama dari pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) adalah sebagai berikut:

- a. Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis
- b. Pusat kegiatan agro-industri berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agro-bisnis.
- c. Pusat pelayanan agro-industri khusus (*special agro industry services*), pendidikan, pelatihan dan pemuliaan tanaman unggulan.

f) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Fungsi utama dari pusat pelayanan kawasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pusat perdagangan lokal yang ditandai dengan adanya pasar harian
- b. Pusat koleksi komoditas pertanian yang dihasilkan sebagai bahan mentah industri
- c. Pusat penelitian, pembibitan dan percontohan komoditas
- d. Pusat pemenuhan pelayanan kebutuhan permukiman pertanian.

g) PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)

adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

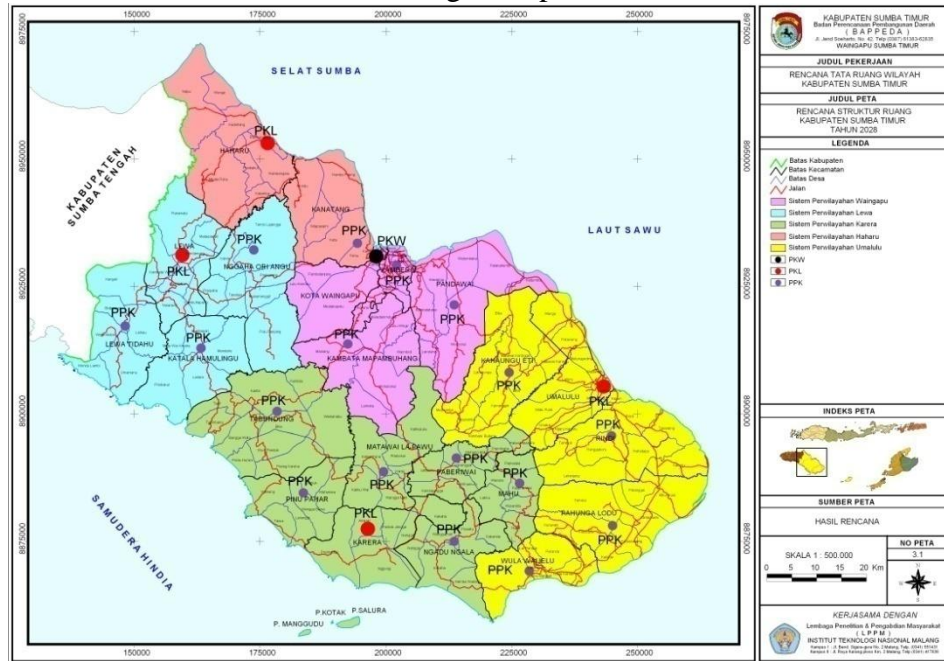
Adapun untuk lebih jelasnya, misalnya Kabupaten Sumba Timur setelah dianalisis kekuatan interaksi spasialnya dengan indikator berikut.

Tabel 2.1 Hirarki Kabupaten Sumba Timur

Ibukota Kecamatan	Berdasarkan Jumlah Penduduk	Fasilitas	Volume Interaksi	Struktur Ruang
Lambanapu	I	I	I	PKW
Lumbukere	I	I	II	PKL
Karera	II	I	I	PKL
Lewa	I	II	I	PKL
Hararu	II	I	I	PKL
Tabundung	II	II	I	PPK
Mahu	II	I	II	PPK
dll	I	II	II	PPK

Maka langsung dikelompokkan sesuai struktur ruang yang berlaku pada Kabupaten Sumba Timur dan mengklasifikasikannya secara berhirarki. Sehingga akan terlihat seperti pada contoh peta dibawah ini.

Gambar 6. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sumba Timur Tahun 2028



III - 10

B. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian ini juga terinspirasi dari penelitian terdahulu, seperti tesis yang berjudul “Arahan Pusat Pelayanan Sebagai Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Jalan Lingkar Kota Weleri” oleh Purhatmanto, program pasca sarjana magister teknik pembangunan wilayah dan kota, Universitas Diponegoro Semarang tahun 2007.

Penelitian tersebut terdapat persamaan penelitian pada pusat pelayanan. Namun, juga terdapat beberapa perbedaan lainnya yang signifikan dengan

penelitian penulis, yaitu pada penelitian penulis hanya akan terfokus pada interaksi spasial pusat pelayanan serta dengan teori yang berbeda pula, di mana penulis menggunakan teori titik henti (*breaking point*), serta juga kajian penulis mengacu pada interaksi spasial. Indikator penentu pusat pelayanan juga berbeda dengan yang terdapat pada penelitian Purhatmanto, penulis memfokuskan pada indikator jumlah penduduk, transportasi, teori titik henti dan sarana.

Penelitian oleh Yani Sulistyoning Tyas tahun 2007 dari Jurusan Geografi Universitas Indonesia tentang Interaksi Keruangan Pada Pusat Kegiatan (Studi Kasus: Ketersediaan Fasilitas di Dalam dan Luar Kampus Universitas Indonesia Depok). Penelitian tersebut memiliki fokus penelitian sama dengan penulis yaitu interaksi keruangan/interaksi spasial, namun yang berbeda di sini adalah objek penelitiannya, yang mana beliau terhadap pusat kegiatan di lingkungan kampus sedangkan penulis pada pusat pelayanan di Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian oleh Adi Yusuf Iskandar tahun 2014 dari Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, tentang Analisis Pusat Pertumbuhan pada Setiap Fungsi Pusat Pelayanan di Kabupaten Boyolali. Penelitian tersebut fokus pada pusat pertumbuhan yang terdapat pada kawasan pusat pelayanan. Berbeda dengan penulis yang memfokuskan pada interaksi keruangan dari setiap pusat pelayanan yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian lain yaitu penelitian oleh Bayu Ariyadi tahun 2014 dari Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, tentang Analisis Interaksi Spasial Pola Morfologi Kota di Wilayah D.I Yogyakarta dengan Wahana Citra

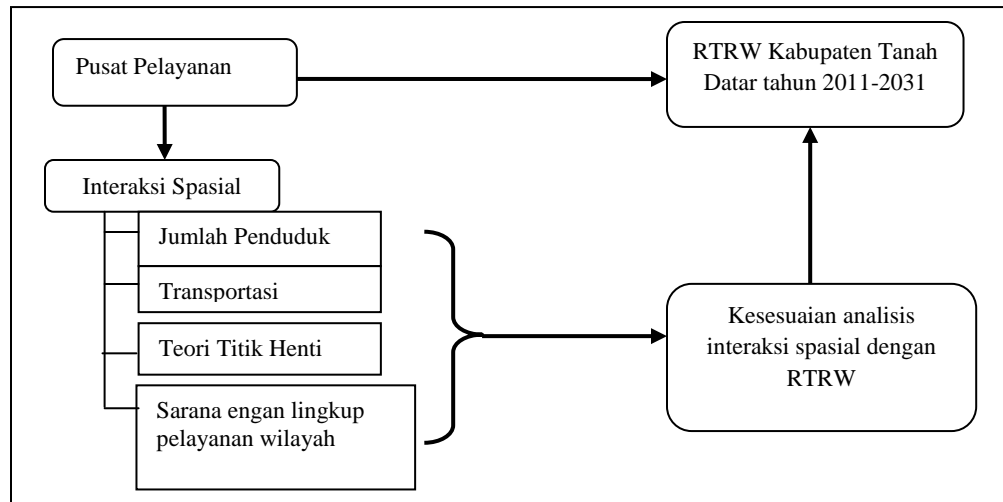
Landsat. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang analisis interaksi spasial, sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian beliau berfokus pada analisis interaksi spasial pola morfologi dengan wahana citra landsat dan penelitian peneliti sendiri berfokus pada interaksi keruangan dari setiap pusat pelayanan yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar.

C. Kerangka Konseptual

Pembangunan fisik kabupaten akan terus dikembangkan dan diperbaiki. Sesuai dengan perkembangan penduduknya yang semakin hari membutuhkan ruang dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk mengatasinya maka pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Tanah Datar membentuk rencana tata ruang wilayah. Dalam rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan periode 2011-2031, terdapat lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai lokasi pusat pelayanan.

Selanjutnya terdapat kerangka konseptual terhadap penelitian ini di mana kerangka konseptual berisi gambaran pola hubungan antarvariabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjelaskan masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritis.

Pada penelitian ini kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6. Kerangka Konseptual

Adanya RTRW Kabupaten Tanah Datar tentunya telah disesuaikan dengan studi tata ruang wilayah. Namun disini perlu dikaji lebih lanjut mengenai kekuatan interaksi spasial antar lokasi pusat pelayanan tersebut agar dapat dianalisis dan disesuaikan dengan fakta lapangan serta pada akhirnya dapat disimpulkan kelayakan lokasi pusat pelayanan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan rangkaian penelitian, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan kekuatan interaksi spasial di Kabupaten Tanah Datar, maka tingkat pusat pelayanan yang diperoleh adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berlokasi di Kota Batusangkar, Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) di Sungai Tarab, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terletak di Pasa Rabaa, Saruaso, Sungayang, Simabur dan Balai tengah, serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terletak di Tabek Patah, Tanjung Alam, Rambatan, Kubu Kerambil, Sumpur, Buo dan Padang Ganting
2. Kesesuaian hasil interaksi spasial terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031, secara keseluruhan beberapa pusat pelayanan sudah sesuai. Namun, untuk PKLp belum sesuai karena lebih baik diposisikan pada Sungai Tarab, dan untuk PPK perlu dimasukkan Pasa Rabaa serta Tabek Patah disesuaikan yang mana semestinya sebagai PPL bukan PPK.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebaiknya perlu adanya evaluasi RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dan juga perlu dikaji kembali

pola tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan mengawasi dan konsisten terhadap rencana pembangunan.

2. Penelitian lanjutan yang penulis sarankan setelah ini adalah analisis keruangan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan potensi ekonomi dan agrokultur yang ada untuk perencanaan pusat pelayanan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syafri. 1999. *Geografi Transportasi dan Perdagangan*. Padang: DIP Proyek Universitas Negeri Padang.
- Bakaruddin. 2012. *Pengantar Geografi Desa dan Kota*. Padang: UNP Press.
- BPS Kabupaten Tanah Datar.2011.*Tanah Datar dalam Angka 2011*
- BPS Kabupaten Tanah Datar.2012.*Tanah Datar dalam Angka 2012*
- BPS Kabupaten Tanah Datar.2013.*Tanah Datar dalam Angka 2013*
- BPS Kabupaten Tanah Datar.2011.*Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Tanah Datar 2011 – 2031*.
- Dickenson, J.P, dkk. 1983. *Geografi Negara Berkembang*. Inggris: University Press Cambridge.
- Daldjoeni, N. 1997. *Geografi Baru (Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: Alumni.
- Daldjoeni, N. 2003. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: PT. Alumni
- Jurnal Kajian LEMHANNAS RI, *Pengembangan Sistem Transportasi Nasional*,Edisi 14; Desember 2012.
- Kasmadi, dkk. 2014. *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Lembaga Demografi FEUI. 2007.*Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia